



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	3 (<i>tiga</i>)
Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Virtual Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM
Hari, Tanggal	:	Kamis, 2 April 2020
Pukul	:	16.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Mohamad Hekal, M.B.A., Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	1. <i>Refocusing/Realokasi</i> Anggaran terkait Covid-19; 2. Regulasi dan Deregulasi tentang Covid-19; dan 3. Aksi Langsung Kementerian/Lembaga menghadapi Covid-19.
Hadir	:	1. Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki beserta Jajaran

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Virtual Komisi VI DPR RI pada pukul 16.23 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Kamis, 2 April 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal, M.B.A.
3. Sehubungan dengan wabah virus Covid 19, maka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dilakukan secara virtual.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi langkah-langkah penanganan Dampak Covid-19 di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM RI dan bagi pelaku Koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia.
2. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Koperasi dan UKM merevisi *roadmap* untuk jangka panjang sampai dengan pasca penanganan Covid-19 serta melakukan pendataan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah secara akurat dan terkini.
3. Komisi VI DPR RI mendukung 8 (*delapan*) program mitigasi Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk menghidupkan kembali perekonomian bagi pelaku usaha kecil dan mikro akibat wabah Covid-19 dengan memberikan fasilitasi dan bantuan dana secara stimulan guna penguatan dan kelangsungan usahanya.
4. Komisi VI DPR RI mendorong Program Mitigasi Kementerian Koperasi dan UKM RI demi penyelamatan iklim bisnis di Indonesia dapat disosialisasikan dengan baik dan terlaksana dengan optimal sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat dan UMKM.
5. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk memberikan kemudahan bagi koperasi dan usaha kecil menengah mendapatkan kredit dan dana stimulus demi menyelamatkan perekonomian nasional.
6. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk menghimpun data-data UMKM yang selama ini tersebar di 18 Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah serta berkoordinasi dengan BPS untuk mendapatkan informasi terkini dari UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM RI diharapkan memiliki *Big Data* yang akurat dan terkini agar dapat segera melakukan pembinaan dan pengembangan koperasi dan ukm secara tepat sasaran.
7. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk memfasilitasi dan memberikan edukasi kepada koperasi maupun usaha kecil dan menengah agar dapat segera bertransaksi secara online melalui *e-commerce* nasional.
8. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 5 (*lima*) hari kerja atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 18.50 WIB.

Jakarta, 2 April 2020
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,

Ttd.

MOHAMAD HEKAL, M.B.A.
A-103